



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

AKSI PETANI WORTEL: Petani menggelar aksi jual wortel hasil panen dengan bayar seikhlasnya di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (23/2). Aksi petani wortel lereng Gunung Merapi dan Merbabu itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena harga wortel di pasaran anjlok Rp 1.000/kg serta masuknya hasil pertanian wortel dari luar daerah Jawa Tengah, sehingga makin sulit menjual hasil panen wortel petani lokal.

DITUNTUT DISIPLIN DAN KONSISTEN

Wujudkan Indonesia Tangguh Bencana

BOGOR (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua tahapan penanggulangan bencana dilakukan secara disiplin dan konsisten, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana.

Sebab sebagai negara yang dilingkari oleh cincin api (ring of fire) dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2).

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor antara lain

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

"Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematis. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten.

Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana," tegasnya.

Kepala Negara pun menekankan bahwa agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. "Agenda besar Indonesia Tangguh Bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen Pemerintah dan semua komponen bangsa. Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana," ujarnya.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas dedikasi yang diberikan dalam

penanggulangan bencana di Tanah Air.

"Saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BNPB dan BPBD di seluruh Tanah Air Indonesia atas dedikasi, atas kerja kerasnya dalam membantu masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dalam menghadapi bencana alam dan juga dalam menghadapi pandemi Covid-19," tandasnya.

Rakornas yang digelar secara hybrid ini mengusung tema Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana, dihadiri sekitar 7.000 peserta. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 23-24 Februari 2022. (Sim)-d

SAMBUT TELEVISI DIGITAL

'Set Top Box' Gratis Dibagikan Maret

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan lembaga penyiaran swasta akan membagikan set top box gratis mulai 15 Maret 2022, menjelang analog switch off tahap pertama.

"Pemerintah akan membagikan set top box, bersama lembaga penyiaran swasta," kata Staf Ahli Menteri Kominfo Henri Subiakto dalam Webinar 'Siaran Bersih, Jernih, Canggih dari Perbatasan' di Jakarta, Rabu (23/2).

Perangkat set top box akan dibagikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki perangkat televisi model lama, yang belum bisa menangkap siaran digital, dan terdaftar pada Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Selain itu, warga negara Indonesia tersebut tinggal di lokasi yang termasuk wilayah siaran yang terdampak ASO. Setelah validasi dan verifikasi data, antara lain dengan Kartu Tanda Penduduk, masyarakat yang datanya sesuai akan bisa mendapatkan set top box secara gratis.

Masyarakat yang berhak akan mendapatkan undangan dari kelurahan atau desa setempat, yang me-

nyatakan bahwa ia adalah penerima set top box.

Kominfo berencana mendistribusikan set top box melalui PT POS Indonesia. Masyarakat diminta untuk membawa undangan tersebut ke lokasi dan tanggal yang sudah ditentukan.

Set top box ini akan dibagikan mulai 15 Maret sampai 30 April kepada masyarakat yang tinggal di wilayah ASO Tahap I. Penghentian siaran televisi terestrial analog tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 30 April di 56 wilayah siaran, yang mencakup 166 kabupaten/kota.

Setelah tanggal 30 April, wilayah tersebut hanya bisa menerima siaran televisi terestrial digital. Jika masih menggunakan televisi model lama, yang belum bisa menangkap siaran digital, masyarakat perlu menggunakan set top box atau tidak bisa menonton siaran televisi terestrial sama sekali.

Menurut Henri, selama ASO, ada sekitar 6,7 juta perangkat set top box yang akan dibagikan pada program penghentian siaran televisi terestrial analog. Sementara bagi masyarakat

yang tidak menerima subsidi, mereka diminta membeli sendiri perangkat set top box agar bisa menonton siaran televisi terestrial digital.

Kominfo sudah memberikan tanda pada set top box yang sesuai dengan spesifikasi televisi digital di Indonesia, yaitu dengan stiker 'Siap Digital' atau maskot siaran digital MODI. Perangkat set top box dan televisi digital yang sudah mengantongi izin dari Kominfo bisa dilihat di situs siaran digital.kominfo.go.id.

Indonesia secara bertahap beralih ke siaran digital mulai tahun ini. Tahap I penghentian siaran televisi terestrial analog, atau analog switch off berlangsung pada 30 April di 56 wilayah siaran, mencakup 166 kabupaten/kota. Tahap kedua berlangsung paling lambat 25 Agustus di 31 wilayah siaran, yang mencakup 110 kabupaten/kota. Tahap terakhir, hingga 2 November di 25 wilayah siaran atau 65 kabupaten/kota. Penghentian siaran televisi terestrial analog diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. (Ant/San)-d

PEMILIHAN REKTOR UII

Hari Ini, Lima Calon Adu Gagasan

SLEMAN (KR) - Lima Calon Rektor UII terpilih, Kamis (24/2) akan memaparkan rencana aksi. Kelima calon tersebut ialah Prof Fathul Wahid ST MSc PhD (Dosen Program Studi Teknik Informatika UII), Dr-Ing Ir Ilya Fadjar Maharika MA IAI (Dosen Program Studi Arsitektur UII), Prof Riyanto SPd MSI PhD (Dosen Program Studi Pendidikan Kimia UII), Dr Drs Rohidin SH MAg (Dosen Program Studi Hukum UII), dan Dr Zaenal Arifin MSi (Dosen Program Studi Manajemen UII).

Panitia pemilihan rektor akan mengundang tiga panelis yakni Rektor IPB University yang juga Ketua Umum ICMI, Prof Dr Arif Satria SP MSi, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Dra Sulistyowati Irianto MA dan Dosen Fakultas Hukum UII yang juga Ketua Komisi

Yudisial Periode 2013 - 2015, Dr Suparman Marzuki SH Msi.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Pemilihan Rektor-Wakil Rektor UII Dr rer Soc Masduki MA, Rabu (23/2). Penyampaian rencana aksi calon Rektor UII menjadi bagian dari pesta demokrasi yang diselenggarakan terbuka dan partisipatif.

Masduki mengemukakan forum Action Plan juga sebagai ajang pertemuan gagasan dan selanjutnya membungkusnya untuk dibawa sebagai amanah Calon rektor terpilih. iSiapa pun yang terpilih akan membawa seluruh gagasan yang muncul. Tidak hanya gagasan secara personal, tetapi juga gagasan kolektif yang diwadahi di forum Action Plan, i tandas Masduki.

Pada Action Plan Pilrek tahun ini sedikit berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, salah satunya ada

diskusi dengan panelis. Tiga panelis yang dihadirkan mewakili tiga pilar perguruan tinggi yang modern, keindonesiaan, dan mempunyai internasional sistem bagaimana melihat tantangan yang ada di level global.

"Intuisi dari tiga panelis ini memandang bagaimana UII tidak hanya mengurus internalnya. Tapi UII juga bagian dari perguruan tinggi di tingkat global yang tercermin dari berbagai pemikiran tiga panelis yang nantinya dititipkan kepada para calon rektor," tutur Masduki.

Ditambahkan rencana kerja atau ide perubahan dari para calon rektor merujuk pada Statuta UII yang dirumuskan Yayasan Badan Wakaf UII, atau yang disebut dengan Rencana Strategis. UII dalam empat tahun ke depan dirancang masuk sebagai universitas yang akan mempersiapkan diri menjadi pre-research university. (Fsy)-f

KPK LUNCURKAN JAGA KAMPUS

Cegah Potensi Korupsi di PT

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kemendikbudristek meluncurkan aplikasi JAGA Kampus untuk mencegah potensi risiko korupsi di lingkungan perguruan tinggi. JAGA Kampus merupakan menu baru pada platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Saat ini, JAGA telah menyajikan berbagai data dan informasi yang meliputi sektor kesehatan, pengelolaan keuangan desa, perizinan dan penanganan Covid-19.

"JAGA Kampus adalah platform yang diharapkan menjadi akses dari masyarakat baik mahasiswa sebagai pengguna lembaga pendidikan tinggi, mungkin juga orang tuanya. Bahkan, juga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mungkin adalah pihak yang terkait dengan kampus," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat peluncuran aplikasi JAGA Kampus yang disiarkan melalui kanal Youtube KPK, Rabu (23/2).

Ghufron mengharapkan, JAGA Kampus dapat membangun integritas tidak hanya dalam pendidikan, namun juga dengan tata kelolanya. "Harapannya, JAGA Kam-

pus memberikan pendidikan tinggi yang tidak hanya berintegritas dalam pendidikan, dalam 'research' dan pengabdian, tetapi juga dengan tata kelolanya supaya terjaga. Supaya tata kelolanya memastikan tidak ada potensi merugikan negara atau potensi tindak pidana korupsi," tuturnya.

Ghufron juga menegaskan, KPK akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pelapor. "KPK tentu dengan aplikasi JAGA Kampus ini sangat melindungi kerahasiaan para pelapor agar tidak kemudian mendapatkan risiko yang kemudian bisa merugikan para pelapor. Jangan sampai mahasiswa yang melapor untuk mendapatkan nilai A ada harganya untuk menyelesaikan tugas akhir ada harganya maka kemudian kami jaga kerahasiannya," papar Ghufron.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyambut baik pengembangan platform JAGA dengan memastikan informasi seputar kampus yang akan membantu mencegah korupsi di dunia pendidikan tinggi. (Ful/Ati)-f

Exit Test PCR Cukup Sekali

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penyederhanaan exit test PCR cukup sekali. Jika sebelumnya harus dilakukan dua kali (pada H+5 dan H+6), sekarang cukup satu kali (pada H+5).

Demikian Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji di Jakarta, Rabu (23/2). Menurut Setiaji, hal itu dilakukan karena banyak aduan masyarakat terkait status warna di PeduliLindungi tak kunjung berubah dari warna hitam menjadi hijau. Padahal hasil tes PCR berikutnya menunjukkan hasil negatif.

Jika exit test PCR tersebut negatif maka status di PeduliLindungi akan secara otomatis berubah menjadi hijau. Penyederhanaan tersebut dimulai Selasa (22/2) pukul 23.59 WIB. Aturan sebelumnya, exit test PCR harus dilakukan dua kali yaitu pada H+5 (hari ke-6) dengan hasil negatif, kemudian harus dilanjutkan untuk tes PCR kedua yaitu hari berikutnya.

"Mulai 22 Februari, untuk exit test PCR kedua ini tidak diperlukan. Jadi

hanya cukup sekali saja melakukan exit test PCR pada H+5 dan hasilnya harus negatif," katanya. Kalau hasil exit test tersebut negatif maka secara otomatis status di PeduliLindungi akan berubah menjadi hijau. Jika tidak melakukan exit test PCR pada H+5 sampai H+10 maka status di PeduliLindungi akan otomatis menjadi hijau di H+10 walaupun tidak melakukan exit test PCR.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, puncak kasus varian Omicron telah melampaui kasus varian Delta yakni di atas 56.000 kasus. Namun, untuk memastikan Indonesia sudah melewati puncak kasus gelombang ketiga masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Prediksi kita minggu keempat sambil memonitor perkembangan kasus lebih lanjut. Kita melihat selama satu minggu terakhir ini hampir semua provinsi terutama Jawa-Bali sudah melewati puncak kasus dan sudah terlihat ada penurunannya," kata Nadia. (Ati)-f

Mahfud Dorong Penyedia Jasa Keuangan Kaji Risiko TPPU dan TPPT

JAKARTA (KR) - Menkopolkukam Mahfud MD mendorong lembaga penyedia jasa keuangan dapat memetakan dan mengkaji risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) di tengah perkembangan teknologi informasi dan digital dalam sektor keuangan. Perkembangan teknologi, yang saat ini digunakan penyedia jasa keuangan, semakin pesat.

"Di antaranya penggunaan *financial technology, artificial intelligence*, aset virtual, bahkan ada penyedia jasa keuangan bank yang pernah mempublikasikan penggunaan *metaverse*," kata Mahfud saat menyampaikan sambutan di acara diskusi yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Jakarta, Rabu (23/2).

Mahfud mengatakan penting untuk mengantisipasi risiko tersebut demi memastikan penyedia jasa keuangan mematuhi dan mendukung tujuan nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pihaknya, juga mengingatkan para penyedia jasa keuangan harus bijak dalam menyikapi berbagai dampak yang berpotensi muncul akibat teknologi baru itu, serta memas-

tikan kebijakannya sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap *Financial Action Task Force* atau FATF.

FATF merupakan organisasi internasional lintas negara yang bertujuan menetapkan standar hukum dan operasional memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman lainnya terhadap keutuhan sistem keuangan internasional. Organisasi yang berkantor pusat di Prancis itu berdiri sejak 1989. Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang masih berstatus sebagai pengamat (observer) atau belum menjadi anggota penuh.

Demi memenuhi syarat menjadi anggota penuh, Indonesia harus memastikan kebijakan dan seluruh pihak terkait, termasuk penyedia jasa keuangan, mematuhi rekomendasi yang diberikan FATF. "Khususnya pada *immediate outcome* 3 dan rekomendasi 15 (yang isinya) bagaimana lembaga pengawas dan pengatur, termasuk OJK dalam hal ini, dapat meningkatkan kepatuhan penyedia jasa keuangan dan penyedia aset virtual," jelas Mahfud.

Di 2021, Pemerintah telah memperbarui penilaian risiko APU PPT dalam dokumen penilaian risiko. (Ant)-f



KR-Antara/Harvian Perdana Putra

EKSPOR KERAJINAN KOK: Perajin memproduksi kok atau 'shuttlecock' untuk olahraga bulutangkis di industri rumahan di Pasekaran, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (23/2). Menurut perajin, industri rumahan dengan menggunakan cara manual tersebut mampu menghasilkan 100-200 kok perhari yang dijual Rp 35.000-Rp 80.000 per tabung isi 12 kok dan diekspor hingga ke Malaysia.